



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
												v																			

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
									v		

TAHUN

2015

HALAMAN

1a

BPK Bilang SKPD Kasihan

RENDAHNYA serapan anggaran pemerintah kota Tarakan termasuk di SKPD Pemerintah Kota Tarakan mendapat tanggapan dari Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara, Nugroho. Saat ditemui *Radar Tarakan*, Nugroho mengatakan rendahnya serapan anggaran ini bisa dikatakan wajar, namun di sisi lain juga dikatakan tidak wajar. "Secara aturan tidak wajar, tetapi karena melihat pencairan dana baru bisa dilakukan pada Juli lalu di setiap tahunnya, maka wajar saja jika serapan anggaran semester I rendah.

Tak Lepas dari Kondisi APBD Kaltara

Tapi tetap tidak bisa dimaklumi," kata Nugroho. Di sisi lain, banyak program di SKPD yang tidak berjalan lantaran kepala SKPD terkait beralasan tidak punya uang, padahal di sisi lain serapan anggarannya minim. Berusaha menelaah bagaimana hal tersebut dapat terjadi, Nugroho berasumsi hal tersebut mungkin terjadi jika memang tidak ada anggaran untuk program yang dimaksud. "Mungkin memang tidak ada uang atau anggaran untuk program tersebut, dan mereka tidak bisa mengalihkan uang atau anggaran program lain ke program tersebut seenaknya. Kalupun mau dialihkan tetap bisa, tapi itupun ada prosesnya dan cukup panjang," jelas Nugroho.

Adapun satu hal lain yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran adalah pembayaran yang dilakukan setelah pengerjaan dilakukan. "Untuk proyek pembangunan fisik, kecuali proyek *multiyears*, kebanyakan penger-

jaan baru akan dibayarkan setelah proyek tersebut selesai. Jadi serapa anggaran baru dapat terlihat signifikan di semester dua. Karena memang di semester satu biasanya dihabiskan SKPD untuk perencanaan," tutur Nugroho.

Selain pembayaran di akhir, Nugroho juga mengatakan adanya ketakutan dalam menggunakan anggaran. Ketakutan pengguna anggaran disebabkan pembiayaan di luar prosedur yang dapat menggelembungkan *cost*. "Kasihannya SKPD ini, mereka juga bingung juga mau pakai uang. Banyak ketakutan ini dan itu. Kalau di sini masih mending, kalau di Jakarta itu lebih parah lagi, seperti jika ingin membangun di lokasi yang biasanya banyak premanismenya, yang tentu harus dibayarkan juga," ujar Nugroho. "Tapi kalau memang menggunakan uang sesuai dengan program yang telah disetujui, ya tidak perlu takut," lanjutnya.

Dengan serapan anggaran yang rendah seperti ini, BPK sebenarnya bisa menegur, namun hanya

sebatas teguran karena hal tersebut kembali lagi pada kebijakan SKPD masing-masing.

Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan Muddain mengatakan, serapan anggaran yang cukup kecil di semester satu ini tak lepas dari kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). "Kaltara itu hanya sekitar Rp 2 triliun. Tarakan sendiri berada di angka Rp 1,83 triliun. Lalu dari angka tersebut kita defisit Rp 175 miliar," sebut Muddain.

Dengan kondisi defisit tersebut, maka sudah sewajarnya ada anggaran yang dialokasikan untuk beberapa program atau dihilangkan. Ia juga menjelaskan, pada dasarnya saat ini untuk fungsi kontrol DPRD tidak bisa serta-merta dilakukan, sebab saat ini masih terus berjalan. "Biarkan saja dulu pemerintah bekerja. Nanti saat sudah memasuki akhir tahun, akan kami bahas," ungkapnya. (*/ans/zia/ash)